BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

3.2.1 Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang

Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang merupakan salah satu unit organisasi di bawah Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pembentukan BPD ini berlandaskan pada "Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016", yang mengatur mengenai Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah. Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, BAPENDA Kota Tangerang dipimpin Kepala Badan yang memiliki kewajiban untuk melapor kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Saat ini, BAPENDA Kota Tangerang terdiri dari 84 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalankan tugas di dalam badan tersebut. Kantor pusat BPD ini terletak di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, yang beralamat di Jl. Satria Sudirman No. 1, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Tugas utama Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Tangerang adalah merancang serta melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus khusus pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pelaksanaan tugas tersebut disesuaikan dengan visi, misi, dan program kerja Walikota, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini mencerminkan peran strategis BPD dalam mendukung pencapaian tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

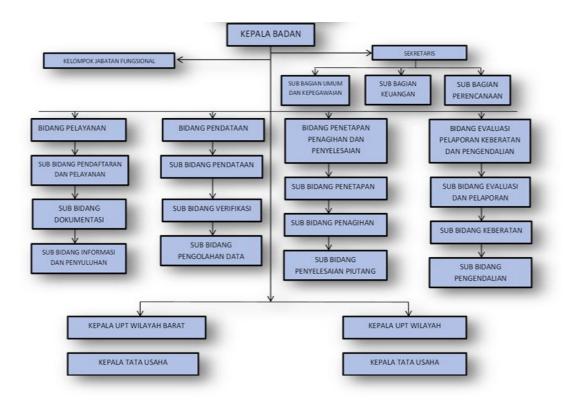
3.3.2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah diatur melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016, yang mengatur mengenai pembentukan dan penyusunan perangkat daerah, sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.1. Struktur organisasi ini mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif:

1. Kepala Badan

- 2. Sekretaris, membawahi tiga sub bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
- 2. Kepala Bidang Pelayanan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan;
 - b. Sub Bidang Dokumentasi
 - c. Sub Bidang Informasi dan Penyuluhan.
- 3. Kepala Bidang Pendataan, Verifikasi dan Pengolahan Data, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendataan;
 - b. Sub Bidang Verifikasi;
 - c. Sub Bidang Pengolahan Data.
- 4. Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Penyelesaian Piutang, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penetapan;
 - b. Sub Bidang Penagihan;
 - c. Sub Bidang Penyelesaian Piutang.
- 5. Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Keberatan dan Pengendalian:
 - a. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Keberatan; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian
- 6. UPT
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional





Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota tangerang

3.4.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang

Visi menggambarkan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan, mencerminkan keadaan ideal yang diinginkan di masa depan, berdasarkan analisis situasi saat ini (kejelasan arah). Pemerintah Kota Tangerang telah merumuskan visi dan misi dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2019–2023, yang bertujuan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Walikota Tangerang:

Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera Berakhlaqul Karimah dan Berdaya Saing.

Sejalan visi tersebut, terdapat tiga misi strategis yang akan dijalankan:

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbaiki sistem pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan sosial, sembari menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, berlandaskan integritas.

- b. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
 - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.

Dalam mendukung pencapaian visi ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang mengemban tanggung jawab utama pada misi pertama, Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas. Misi pertama menekankan keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Hal ini membutuhkan aparatur yang kompeten, profesional, berkualitas, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

Tujuan terkait misi pertama untuk BAPENDA adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan mampu menyediakan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Tujuan utama yang bermaksud untuk dicapai adalah: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mutu pelayanan publik. Dengan demikian, BPD berperan signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Tangerang.

3.1.4 Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang

Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Tangerang memiliki peran utama dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BAPENDA Kota Tangerang menangani fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis yang mengacu pada tanggung jawabnya dalam hal perumusan kebijakan pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB.
- b. Pelaksanaan dukungan teknis yang sejalan dengan ruang lingkup tugasnya di bidang pendataan, penilaian, serta penetapan PBB dan BPHTB.

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan pelaksanaan dukungan teknis dalam lingkup tugasnya di bidang PBB dan BPHTB.
- d. Pengelolaan data dan informasi terkait.
- e. Penyediaan layanan terkait PBB dan BPHTB.
- f. Proses penagihan Pajak Daerah.
- g. Pengawasan dan penyelesaian sengketa yang muncul dalam pemungutan PBB dan BPHTB.
- h. Penyelenggaraan koordinasi dalam pemungutan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah lainnya.
- i. Pembinaan teknis untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi terkait urusan pemerintahan Daerah dalam lingkup pemungutan PBB dan BPHTB.
- j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan kewenangan dan fungsi yang dimiliki.

3.2Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi pengelolaan teknologi informasi dengan merujuk pada standar COBIT. Data dikumpulkan lewat wawancara dan observasi, yang dimaksudkan mengevaluasi ingkat kapabilitas pengelolaan serta pemanfaatan teknologi informasi di dalam organisasi. Pendekatan deskriptif kualitatif ini digunakan sebagai instrumen analisis untuk menilai kinerja teknologi informasi yang sedang diterapkan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori di kerangka kerja COBIT 5, untuk memberikan wawasan yang lebih terstruktur mengenai efektivitas penerapan "tata kelola teknologi informasi.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel independen

Studi terkait pengelolaan teknologi informasi di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang mengadopsi kerangka kerja COBIT 5 sebagai pedoman. Proses pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian diskusi dan wawancara, yang

bertujuan untuk mengevaluasi tiga proses utama sebagai konsern di departemen tersebut, adalah:

- 1. APO04 (Mengelola Inovasi)
- 2. APO02 (Mengelola Strategi)
- 3. BAI08 (Mengelola Pengetahuan)

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini difokuskan pada pencapaian hasil akhir, yang mencakup temuan, analisis kesenjangan (*gap analysis*), dan rekomendasi perbaikan yang ditujukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, data diperoleh melalui tiga pendekatan utama, yaitu observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Fakta dikumpulkan dengan cara tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukkan untuk analisis permasalahan.

1. Observasi

Pendekatan observasi dilakukan dengan menggabungkan teknik pengamatan langsung dan pencatatan ingatan. Pengamatan ini terbagi dalam dua jenis, yakni observasi partisipatif dan observasi nonpartisipatif. Pengamatan jenis pertama (observasi partisipan) adalah pengamat terlibat secara langsung dengan aktivitas harian objek yang diamati. Pada observasi nonpartisipan, pengamatan dilakukan secara independen dan pengamat tidak terlibat secara langsung [14].

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung dari responden yang terlibat dalam pengelolaan teknologi informasi (TI). Metode ini memungkinkan responden menyampaikan pendapat dan ide secara terbuka [29]. Data yang dikumpulkan mencakup tanggung jawab pekerjaan (*job desk*), proses bisnis, serta permasalahan yang dihadapi organisasi. Informasi ini digunakan untuk memahami kondisi umum tata kelola TI di organisasi.

3. Analisis Dokumen

4. Metode analisis dokumen digunakan bertujuan mendalami dan memperkuat informasi *yang* telah diperoleh melalui wawancara, dengan memberikan bukti atau data pendukung yang lebih mendalam [15]. Dalam pendekatan ini, penulis mengumpulkan data dan informasi dengan cara menelaah serta mempelajari seluruh dokumen dan laporan yang relevan terkait dengan teknologi informasi di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Tahapan Analisis Data

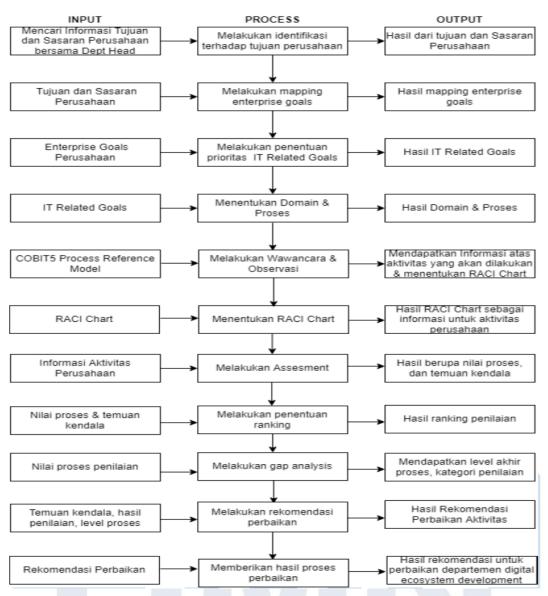
Peneliti melakukan serangkaian langkah untuk mengidentifikasi tingkat kapabilitas, menganalisis kesenjangan, dan memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Berikut adalah tahapan-tahapan yang diambil dalam Aktivitas Proses Penilaian (Assessment Process Activities) [13]:

- Inisiasi: Tahap pertama melibatkan pengumpulan informasi dan fakta yang relevan dari organisasi. Informasi ini akan digunakan untuk menyusun pemetaan terhadap proses-proses COBIT 5 yang akan diterapkan dalam penilaian ini.
- 2. Perencanaan Penilaian: Pada fase ini, dilakukan penyusunan daftar peserta yang akan terlibat dalam penelitian pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI. Proses ini bertujuan untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak yang relevan dan kompeten dalam penilaian tersebut.
- 3. *Briefing*: Pada tahap ini, peserta akan diberi penjelasan mendalam mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam menilai tata kelola TI. Penjelasan ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang jelas dan kesepakatan tentang proses yang akan dijalankan.
- 4. Pengumpulan Data: Langkah ini berfokus pada identifikasi sasaran hasil yang telah dideskripsikan dalam COBIT 5 pada setiap tahapan utama. Proses ini akan membantu dalam menentukan indikator yang akan digunakan untuk menilai setiap aspek tata kelola TI.
- 5. Validasi Data: Tahap ini melibatkan validasi terhadap bukti atau *output* yang telah ditentukan berdasarkan COBIT 5, dengan membandingkannya dengan

- dokumen yang tersedia di dalam organisasi. Proses ini penting untuk memastikan kesesuaian antara data yang dikumpulkan dan dokumentasi yang ada.
- 6. *Penilaian Atribut Proses*: Dalam tahap ini, dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan atribut proses yang ada dalam organisasi berdasarkan hasil penilaian sebelumnya. Pemeriksaan ini bermaksud guna meyakinkan agar semua atribut yang relevan telah teridentifikasi, terukur dengan baik.
- 7. Pelaporan Hasil: Tahap akhir adalah penyusunan laporan hasil penilaian yang mencakup analisis mendalam dan rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai bisnis dan nilai TI dalam organisasi, dengan fokus pada penerapan solusi yang lebih efektif dan efisien.



3.5.2 Metode Penyelesaian Masalah Dengan Framework COBIT5



Gambar 3.2 Kerangka Pikir

Dasar pemikiran yang terlihat pada Gambar 3.2 menggambarkan langkahlangkah yang harus diikuti saat melaksanakan penelitian tata kelola TI menggunakan *framework* COBIT 5. Berikut adalah penjelasan mengenai tiap tahapan yang tersedia, yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif:

- 1. Memahami Tujuan Perusahaan di BAPENDA Kota Tangerang dalam Penerapan TI
 - a. Masukan

Proses dimulai dengan menanyakan kepada yang terkait di lembaga untuk menggali informasi mengenai tujuan dan sasaran yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

b. Proses

Informasi yang terkumpul kemudian dimanfaatkan untuk memetakan Enterprise Goals, IT-Related Goals, serta Bidang yang dievelauasi.

c. Hasil

Hasil akhirnya adalah mendapatkan keterangan yang relevan terkait dengan pengembangan departemen digital *ecosystem*.

 Melaksanakan Identifikasi tujuan organisasi dengan Enterprise Goals yang Dipilih dalam Kerangka Kerja COBIT 5

a. Masukan

(Bagian input tidak disebutkan dalam teks asli, jadi bagian ini dapat dibiarkan kosong atau perlu disesuaikan dengan informasi relevan).

b. Proses

Informasi mengenai tujuan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang digunakan untuk memperoleh enterprise goals yang sesuai dalam kerangka kerja COBIT 5.

	Figure 5—COBIT 5 Enterprise Goals								
		Relation to Governance Objectives							
BSC Dimension	Enterprise Goal	Benefits Realisation	Risk Optimisation	Resource Optimisation					
Financial	Stakeholder value of business investments	P		S					
	Portfolio of competitive products and services	P	P	S					
	Managed business risk (safeguarding of assets)		P	S					
	Compliance with external laws and regulations		P						
	5. Financial transparency	P	s	s					
Customer	Customer-oriented service culture	P		s					
	7. Business service continuity and availability		P						
	Agile responses to a changing business environment	P		s					
	Information-based strategic decision making	P	P	P					
	10. Optimisation of service delivery costs	P		P					
Internal	11. Optimisation of business process functionality	P		P					
	12. Optimisation of business process costs	P		P					
	13. Managed business change programmes	P	P	s					
	14. Operational and staff productivity	P		P					
	15. Compliance with internal policies		P						
Learning and Growth	16. Skilled and motivated people	S	P	P					
	17. Product and business innovation culture	P							

Gambar 3. 3 COBIT 5 Enterprise Goals

c. Hasil

Gambar 3.3 menunjukkan "17 daftar enterprise goal"s yang telah ditetapkan sebagai kriteria dalam "kerangka kerja COBIT 5". Identifikasi tujuan ini didasarkan pada kebutuhan terkini lembaga, berdasar pada objektif yang relevan, yaitu optimalisasi profit, pengelolaan resiko, dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Proses identifikasi ini dilakukan dengan memilih "prioritas (P)" yang ingin dicapai oleh lembaga atau instansi pemerintah. "*Enterprise goals*" yang teridentifikasi kemudian disesuaikan dengan maksud yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang.

3. Melakukan Pemetaan Tujuan Terkait TI

- a. Masukan
- b. Proses

Hasil dari pemetaan Tujuan *Enterprise* pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang digunakan sebagai landasan untuk merumuskan Tujuan Terkait Teknologi Informasi (*IT Related Goals*) yang digambarkan dalam Gambar 3.4.

Figure 22—Mapping COBIT 5 Enterprise Goals to IT-related Goals																			
			Enterprise Goal																
			Stateholdervolue of husiness investments	Purtidio of compatitive products and services	Managed business risk (safeguanding of assets)	Compliance with external laws and regulations	Financial transparency	Quapmik-dientikd service culture	Business service confinity and availability	Agte responses to a changing business environment	Information-based state (ic decision making	Optimisation of service delivery costs	Optimisation of business process bracionality	Optimisation of tusiness process sosts	Managed burines changs programmes	Operational and staffproductivity	Compliance within temal polities	Skilled and motivated people	Product and business innivation cultue
		1.	2.	1	4.	5.	6.	7.	R.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16. Lean	17.	
IT-related Goal		Fnarcial			Customer					Internal					and Growth				
	01	Alignment of IT and business strategy	P	P	S			P	S	P	P	S	P	S	P			S	S
Phardal	02	IT compliance and support for business compliance with external laws and regulations			s	P											P		
	03	Commitment of executive management for making IT-related decisions	P	s	s					s	s		s		P			\$	s
	04	Managed IT-related business risk			P	S			P	S		P			S		S	\$	
	06	Realised benefits from IT-enabled investments and services portfolio	P	P				s		S		s	s	P		s			s
	06	Transparency of IT costs, benefits and risk	S		S		P				S	P		P			$oxed{oxed}$		
Customer	07	Delivery of IT services in line with business requirements	P	P	s	s		P	s	P	s		P	S	s			s	s
Custo	08	Adequate use of applications, information and technology solutions	s	s	s	L		s	s		s	s	P	S		P		s	s
	09	IT agility	S	P	S			S		P	Ш	ш	P		S	S		\$	P
	10	Security of information, processing infrastructure and applications			P	P	L		P								P	Ш	
	"	Optimisation of IT assets, resources and capabilities	P	s						s		P	s	P	s	S			s
Imemi	12	Enablement and support of business processes by integrating applications and technology into business processes	s	P	s			s		s		s	P	S	s	5			s
	13	Delivery of programmes delivering benefits, on time, on budget, and meeting requirements and quality standards	r	S	S			s				5		s	P				
	14	Availability of reliable and useful information for decision making	S	s	s	s			P		P								
	15	IT compliance with internal policies			S	S											P		
Lerring Ind Growth	16	Competent and motivated business and IT personnel	s	s	P			s		S						P		P	s
E E	17	Knowledge, expertise and initiatives for business innovation	s	P				s		P	s		s		s			\$	P

Gambar 3. 4 COBIT 5 IT Related Goals

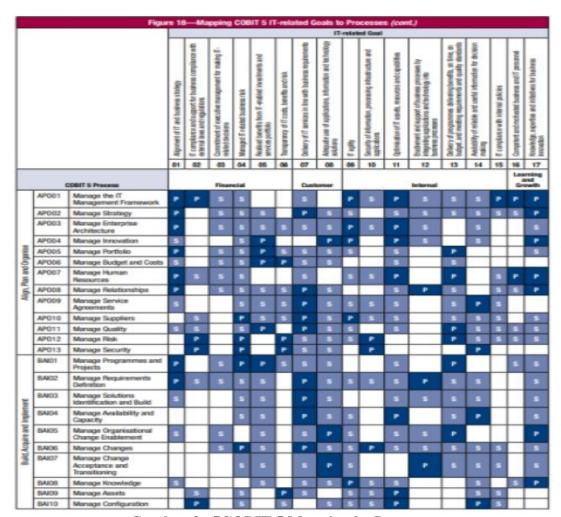
c. Hasil

Gambar di atas menggambarkan proses pemetaan serta hasil dari tujuan lembaga yang telah diterjemahkan menjadi tujuan terkait teknologi informasi (IT related goals) dalam kerangka kerja COBIT 5. Pada tahap ini, auditor diharuskan untuk melakukan pemetaan tujuan lembaga dengan menyesuaikan komponen yang dipilih ke dalam tujuan terkait TI. Hasil dari pemetaan ini adalah tujuan terkait TI yang tepat, yang ada dalam COBIT 5, dan akan dimanfaatkan sebagai "domain" serta langkah dalam rangka melaksanakan evaluasi.

- 4. "Penentuan Domain Proses" untuk Menilai Kegiatan Lembaga
 - a. Masukan
 - b. Proses

Tujuan terkait TI yang sudah diperoleh akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan evaluasi pada tahapan-tahapan yang ada dalam kerangka kerja COBIT5.





Gambar 3. 5COBIT 5 Mapping ke Process

Gambar 3.5 menggambarkan langkah-langkah yang mengubah tujuan terkait TI menjadi domain dan proses dalam COBIT5, yang didasarkan pada Pola Referensi Proses.

c. Hasil

Menentukan domain dan proses yang relevan dalam COBIT5, yang akan diterapkan untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga.

 Melaksanakan Wawancara dan Observasi Informasi kepada Pihak Lembaga Berdasarkan Domain dan Proses dari Kerangka Kerja COBIT5 yang Terpilih.

a. Masukan

Domain dan proses COBIT5 yang telah dipilih pada tahap sebelumnya akan digunakan sebagai panduan untuk menilai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga.

b. Proses

Melaksanakan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan seputar kegiatan yang relevan. Proses ini bertujuan agar jawaban yang diperoleh dapat menyelesaikan aktivitas yang telah ditentukan, dengan mengacu pada *RACI chart*.

c. Hasil

Informasi yang diperoleh dari setiap aktivitas akan disusun dalam bentuk RACI chart yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses selanjutnya.

- 6. Menetapkan RACI Chart dalam memilih narasumber untuk wawancara, dengan pertimbangan berdasarkan domain dan proses yang telah dipilih.
 - a. Masukan

Menyiapkan tabel *RACI chart* yang memuat informasi mengenai para pihak yang memiliki peran sebagai *Responsible, Accountable, Consulted,* dan *Informed*.

b. Proses

Menyusun RACI chart untuk proses yang telah dipilih, kemudian melakukan analisis mendalam untuk menentukan sumber informasi yang tepat berdasarkan kegiatan dan domain yang telah ditentukan.

c. Hasil

Setelah pemetaan RACI chart selesai dilakukan, sumber informasi yang terpilih akan ditetapkan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung tahapan kegiatan dalam kerangka kerja COBIT5.

- 7. Melaksanakan tahapan Penilaian Berdasarkan "Hasil Wawancara" yang telah dilaksanakan
 - a. Masukan

Info yang diperoleh mengenai kegiatan lembaga akan dijadikan landasan dalam tahap evaluasi.

b. Proses

Dokumen penilaian yang mencatat infor yang didapat akan dianalisis dan dinilai berdasarkan kesesuaian kegiatan yang tercantum. Analisis terhadap jawaban yang diberikan akan dibandingkan dengan kegiatan yang terdaftar dalam COBIT 5.

c. Hasil

Hasil evaluasi akan berupa pemberian nilai atau skor untuk setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh lembaga, serta pemrosesan temuan yang ada untuk dianalisis lebih lanjut.

8. Melaksanakan Pemetaan Masalah yang ada pada kegiatan dalam Kerangka Kerja COBIT5

a. Masukan

Keterangan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh lembaga akan dijadikan acuan untuk mendeteksi masalah yang mungkin muncul.

b. Proses

Perbandingan dilakukan antara jawaban yang diberikan atas aktivitas yang telah dilakukan dan standar yang ada dalam COBIT 5. Ketidaksesuaian kegiatan yang dilakukan lembaga dengan proses yang ada dalam Process Reference Model akan dipetakan sebagai masalah. Temuan yang ditemukan akan ditulis dalam tabel yang memuat gambaran kondisi, analisis sebab akibat, dan rencana perbaikan pada dokumen audit.

c. Hasil

Kegiatan lembaga yang tidak sama dengan tahapan yang ada dalam COBIT5 akan digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi.

9. Melaksanakan Penilaian Posisi untuk memutuskan Tingkat Penerapan Aktivitas pada Kerangka Kerja COBIT5.

a. Masukan

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan akan dijadikan acuan untuk menetapkan peringkat atau level, yang berfungsi untuk menilai sejauh mana lembaga telah mengimplementasikan kegiatan yang tercantum dalam kerangka kerja COBIT5.

b. Proses

Penilaian dilakukan terhadap 9 atribut proses dan 6 level kapabilitas, berdasarkan jawaban yang diperoleh dari lembaga. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menentukan apakah suatu tahapan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke level berikutnya atau tidak.

c. Hasil

Kesimpulan penilaian peringkat atau level akan dipakai sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi terkait kegiatan yang dijalankan oleh lembaga

10. Memberikan Rekomendasi kepada Pihak Lembaga atas hasil temuan yang ditemukan, sebagai Dasar Perbaikan di Masa Depan.

a. Masukan

Fakta terkait temuan hambatan, kategori penilaian, dan level proses akan dipakai sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan kegiatan lembaga.

b. Proses

Deskripsi kondisi akan disusun untuk menggambarkan kendala yang ditemukan dalam kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan minimal yang terdapat dalam COBIT 5.

c. Hasil

Hasil rekomendasi perbaikan disampaikan kepada pihak lembaga untuk dipertimbangkan sebagai langkah perbaikan di masa depan.

- 11. Memberikan Hasil Rekomendasi Perbaikan kepada Pihak Lembaga untuk diimplementasikan di Masa Depan
 - a. Masukan

Rekomendasi perbaikan yang telah disusun oleh auditor akan diproses untuk diserahkan kepada sumber informasi yang terkait.

b. Proses

Memberikan rekomendasi perbaikan kepada BAPENDA Kota Tangerang sebagai pihak yang bertanggung jawab.

c. Hasil

Rekomendasi yang diberikan akan menjadi acuan bagi BAPENDA Kota Tangerang untuk perbaikan aktivitas di masa depan.